



► KESEJAHTERAAN DESA

Dana Desa Termin Pertama Cair Februari

WONOSARI—Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul menargetkan dana desa termin pertama bisa dicairkan Februari mendatang. Total pagu dana desa untuk 144 kalurahan di Gunungkidul sebesar Rp168,8 miliar.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul, Khoiru Rahmat, mengatakan pagu dana desa untuk setiap kalurahan sudah ditentukan. Penyaluran tahap pertama didasarkan ketentuan Kementerian Keuangan tertanggal 13 Januari 2025.

Dana desa akan disalurkan dua kali. Kalurahan berstatus desa mandiri akan menerima 60% di termin pertama dan 40% pada termin kedua.

“Untuk di luar desa berstatus mandiri, penciarannya 40 persen di termin pertama dan 60 persen di termin kedua,” kata Rahmat, Rabu (22/1).

Dana desa termin pertama sudah masuk ke rekening kas kalurahan paling lambat Juni 2025.

Guna mempercepat proses ini, Rahmat sudah berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah untuk melakukan asistensi dan pendampingan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan Anggaran Pendapatan

Belanja Kalurahan (APBKal) 2024. Hingga saat ini, kalurahan di Gunungkidul masih menyusun laporan tersebut.

“Paling lambat LPj sudah diserahkan 31 Januari dan itu menjadi salah satu syarat untuk pencairan dana desa termin pertama,” katanya.

Pagu dana desa sudah ditetapkan sebesar Rp168.808.759.000. Jumlah ini terdiri dari alokasi dasar Rp100.491.934.000 dan alokasi formula Rp62.629.605.000.

“Selain itu, juga ada alokasi kinerja Rp5.687.220.000 sehingga total jumlahnya untuk 144 kalurahan di Gunungkidul sebesar Rp168,8 miliar,” kata Rahmat.

Lurah Bendung, Semin, Didik Rubiyanto mengatakan sudah menyelesaikan peraturan tentang APBKal 2025. Di dalam peraturan ini terdapat pagu pendapatan dari dana desa dengan besaran lebih dari Rp1 miliar.

“Sudah ada pagunya termasuk pagu Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul,” katanya.

Didik mengungkapkan pagu dana desa dari Pemerintah Pusat rencananya dipergunakan untuk sejumlah kegiatan mulai dari penanganan *stunting*, ketahanan pangan. Selain itu, juga ada program pengentasan kemiskinan melalui penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). “Penggunaan kami sesuaikan dengan aturan yang ada,” katanya.

(David Kurniawan)